

ABSTRAK

Tata kelola dalam pengawasan harga kopi harus didukung dengan kebijakan yang kuat dan jelas. Undang-Undang Perlindungan Petani dan Peraturan Gubernur Aceh belum mampu mengatur dan menjangkau pengawasan harga di tingkat petani dan pengepul sehingga menyebabkan harga tidak stabil, tidak adil dan menghambat pengembangan industri kopi secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana kebijakan tata kelola pemerintah daerah dalam pengawasan harga kopi gelondong serta hambatan struktural dan non struktural dalam pengawasan harga kopi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan Tata Kelola dalam Pengawasan Harga Kopi Gelondong di Kabupaten Bener Meriah dilihat dari (1) Pendekatan *Co-Governing* (Hubungan horizontal dan kesetaraan antar pihak) dan *Mixed Mode Governing* (Kerjasama dan keterlibatan semua aktor) tidak berjalan di tingkat daerah, aktor bekerja secara terpisah menghasilkan fragmentasi lembaga. Kelemahan regulasi: Pemerintah daerah tidak memiliki regulasi lokal yang jelas dan kuat untuk intervensi dan mengawasi harga serta mengatur distribusi. Dominasi pasar: Pengepul adalah pihak paling kuat dalam menentukan harga beli kepada petani, (2) Hambatan Struktural: Keterbatasan kewenangan pemerintah daerah, lemahnya kelembagaan petani, kurangnya infrastruktur pendukung pasar, sumber daya manusia, koordinasi antar lembaga, informasi pasaran harga dan perubahan cuaca. Hambatan Non Struktural: Budaya ekonomi tunai dan perilaku konsumtif petani. Ketergantungan sosial dan ekonomi yang kuat kepada pengepul memperkuat dominasi pengepul dalam menentukan harga beli. Rekomendasi: mengesahkan qanun kopi, meningkatkan koordinasi antar lembaga pemerintah dan swasta, melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan membuat sistem distribusi kopi yang transparan, teratur dan tidak panjang serta aktif dalam memberikan informasi pasaran harga dan nilai jual internasional dan domestik kepada petani.

Kata Kunci: Harga Kopi, Kebijakan, Pengawasan, Tata Kelola

ABSTRACT

Governance in monitoring coffee prices must be supported by a strong and a clear policies. The Farmer Protection Law and the Aceh Governor's regulations have not been able to regulate and cover price monitoring at the farmer and collector level, resulting in unstable, unfair prices and hampering the sustainable development of the coffee industry. This study aims to identify and describe how local government policies are implemented in monitoring coffee prices, as well as the structural and non structural obstacles in monitoring these prices. This research uses descriptive qualitative research methods. Data sources used are primary data and secondary data with data collection techniques using observation techniques, interviews and documentation. Data was analyzed using data collection techniques, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The result of the research showed that the Governance Policy in Monitoring Prices of Cherry Coffee in Bener Meriah Regency is seen from (1) The Co-Governing (Horizontal relations and equality between parties) and Mixed Mode Governing approaches (Cooperations and involvement of all actors) do not work at the regional level, actors working separately resulting in institutional fragmentation. Regulatory weaknesses: Local governments do not have clear and strong local regulations to intervene and monitor prices and regulate distribution. Market dominance: Collectors are the most powerfull parties in determining purchasing prices for farmers, (2) Structural Obstacles: Limited regional government authority, weak farmer institutions, lack of market supporting infrastructure, human resources, coordination between institutions, market prices information and weather changes. Non Structural Obstacles: Cash economy culture and farmers consumptive behavior. Strong social and economic depedence on collectors strengthens the dominance of collectors in determining purchase prices. Recommendations: ratify the Qanun Kopi, improve coordination between government and private institutions, carry out outreach to the community and create a coffee distribution system that is transparant, orderly, and not long and active in providing market information on international and domestic prices and sale value to farmers.

Keywords: Coffee Prices, Policy, Supervision, Governance